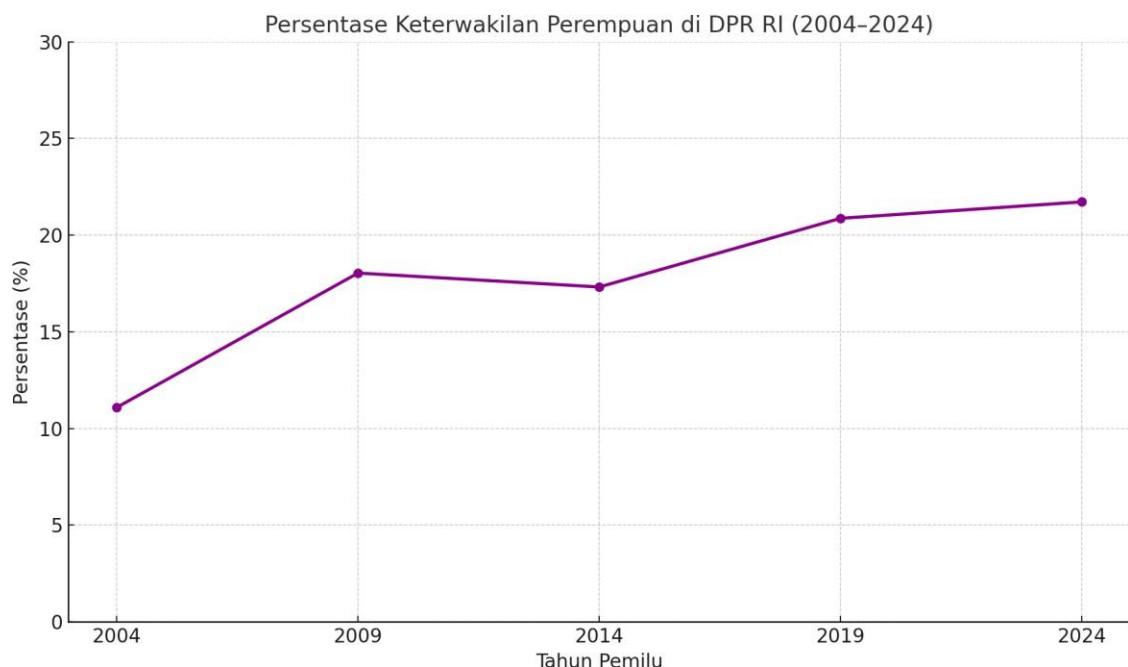


## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah bagian penting dari demokrasi yang adil dan terbuka untuk semua. Ketika perempuan bisa ikut membuat keputusan politik, maka kebijakan yang lahir akan lebih mewakili kebutuhan semua kelompok, termasuk kelompok yang selama ini sering diabaikan. Karena itu, Indonesia telah menetapkan kebijakan kuota 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif. Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Harapannya, dengan adanya kuota ini, perempuan akan lebih punya peluang untuk ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional maupun daerah (Siregar, 2020).



**Gambar 1.1 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI**

Diagram berikut menunjukkan perkembangan persentase keterwakilan perempuan di DPR RI dalam lima periode pemilu, yaitu tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024. Dari data tersebut terlihat adanya tren peningkatan secara umum, meskipun fluktuatif. Pada tahun 2004, perempuan hanya menempati sekitar 11,09% dari total kursi DPR. Kemudian terjadi lonjakan signifikan pada Pemilu 2009 dengan persentase mencapai 18,04%, yang menandai dorongan afirmatif melalui kebijakan kuota mulai memberikan dampak terhadap hasil pemilu.

Namun, pada tahun 2014 terjadi sedikit penurunan menjadi 17,32%, yang menunjukkan bahwa peningkatan keterwakilan perempuan belum konsisten setiap periode. Meskipun demikian, tren positif kembali terlihat pada tahun 2019 dengan persentase 20,87%, dan diperkirakan meningkat lagi menjadi 21,72% pada tahun 2024 (data sementara). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kuota 30% belum sepenuhnya tercapai, ada progres bertahap menuju representasi yang lebih setara di parlemen. Peningkatan ini mencerminkan kesadaran publik dan partai politik yang semakin terbuka terhadap partisipasi perempuan dalam politik, meski masih memerlukan penguatan dukungan sistemik.

Namun dalam praktiknya, aturan ini belum sepenuhnya berhasil. Memang, secara administratif partai-partai politik sudah memasukkan perempuan dalam daftar calon, tapi jumlah perempuan yang benar-benar terpilih masih jauh dari target. Banyak calon perempuan justru ditempatkan di posisi yang tidak strategis dalam daftar calon, sehingga kecil kemungkinannya untuk menang. Ini bukan hanya soal teknis pemilu, tapi juga soal struktur sosial yang tidak mendukung perempuan untuk maju. Seperti yang dijelaskan Budiatri (2019), masih kuatnya

budaya patriarki, minimnya akses perempuan terhadap sumber daya, serta kurangnya dukungan dari partai politik menjadi penghalang utama bagi keterwakilan perempuan di parlemen.

Budaya patriarki masih sangat memengaruhi pandangan banyak orang di Indonesia. Banyak yang masih percaya bahwa laki-laki lebih cocok untuk memimpin atau terlibat dalam politik, sementara perempuan dianggap lebih cocok di rumah. Pemikiran seperti ini tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dari dalam partai politik itu sendiri. Akibatnya, perempuan yang ingin terjun ke politik sering kali tidak mendapatkan dukungan yang cukup. Padahal, untuk bisa bersaing dalam pemilu, mereka butuh dukungan finansial, jaringan politik, dan pelatihan kepemimpinan. Tanpa dukungan ini, kuota 30 persen hanya akan menjadi angka tanpa makna. Selain persoalan struktur dan budaya, cara pandang atau persepsi masyarakat terhadap perempuan di politik juga sangat berpengaruh. Jika masyarakat punya pandangan positif, maka dukungan terhadap kebijakan kuota akan tinggi. Tapi kalau masyarakat masih menganggap perempuan tidak cocok jadi pemimpin, maka kebijakan ini akan sulit dijalankan dengan efektif. Apalagi persepsi generasi muda seperti mahasiswa sangat penting, karena mereka yang nanti akan jadi pemimpin masa depan. Pandangan mereka bisa menunjukkan seberapa besar peluang kebijakan ini untuk berhasil di masa yang akan datang.

Mahasiswa adalah kelompok yang punya posisi strategis dalam perubahan sosial. Selain sebagai pemilih, mereka juga calon pemimpin dan pengambil keputusan di masa depan. Maka, penting untuk mengetahui bagaimana mahasiswa

memahami dan menilai kebijakan kuota 30 persen ini. Apakah mereka mendukung? Atau justru menolak karena menganggap itu tidak adil? Pemahaman mereka juga menunjukkan seberapa jauh kampus berhasil menanamkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan politik.

FISIP Universitas Siliwangi adalah tempat yang cocok untuk meneliti persoalan ini. Karena di FISIP, mahasiswa mempelajari langsung soal politik, pemerintahan, dan kebijakan publik. Mereka seharusnya punya bekal yang cukup untuk memahami isu representasi gender di parlemen. Tapi sampai saat ini belum banyak riset yang melihat bagaimana pandangan mahasiswa FISIP Universitas Siliwangi soal kuota perempuan ini. Penelitian ini akan membuka ruang itu, sekaligus melihat apakah ada perbedaan pandangan yang mencolok di antara mahasiswa yang belajar ilmu sosial dan politik. Di level dunia, keterwakilan perempuan juga masih jadi tantangan besar. Menurut laporan *Inter-Parliamentary Union* (IPU) tahun 2023, rata-rata perempuan yang duduk di parlemen baru mencapai 26,5 persen. Di Indonesia, jumlah perempuan yang berhasil duduk di DPR RI juga baru sekitar 20,5 persen. Ini berarti, meskipun aturan kuota sudah ada sejak lama, hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Banyak negara menghadapi masalah serupa, sehingga ini bukan hanya masalah lokal, tapi juga global. Agar kebijakan kuota ini bisa berhasil, masyarakat harus memahami bahwa ini bukan soal memberi keistimewaan pada perempuan, tapi soal memperbaiki ketimpangan yang sudah ada sejak lama. Jika mahasiswa memahami latar belakang ini, maka mereka akan mendukung kebijakan kuota secara lebih sadar. Tapi kalau mereka menganggap ini sebagai bentuk ketidakadilan baru, bisa jadi

mereka malah menolaknya. Maka dari itu, perlu ada pendidikan politik yang menekankan bahwa kesetaraan bukan berarti mengurangi hak orang lain, tapi menyetarakan peluang yang selama ini timpang.

Pandangan mahasiswa juga dipengaruhi oleh banyak hal, seperti keluarga, lingkungan, pengalaman organisasi, dan akses informasi. Mahasiswa yang aktif dalam organisasi atau sering mengikuti diskusi politik cenderung lebih terbuka terhadap isu kesetaraan gender. Sementara itu, mereka yang tidak aktif atau minim informasi bisa jadi punya pandangan yang lebih konservatif. Itulah sebabnya, penting untuk melihat latar belakang mahasiswa agar kita bisa memahami kenapa mereka mendukung atau menolak kebijakan afirmasi ini. Kita juga perlu melihat sejauh mana mahasiswa menyadari bahwa kehadiran perempuan di parlemen akan membawa perspektif berbeda dalam membuat kebijakan. Misalnya, isu-isu seperti kesehatan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, dan pendidikan anak cenderung lebih diperjuangkan oleh legislator perempuan. Jadi, ini bukan cuma soal jumlah perempuan di DPR, tapi juga soal kualitas kebijakan yang lebih adil dan responsif terhadap semua warga.

Untuk bisa memperjuangkan representasi perempuan yang lebih baik, partai politik punya peran penting. Karena partailah yang menentukan siapa yang akan maju sebagai calon legislatif. Sayangnya, tidak semua partai benar-benar serius mendorong keterwakilan perempuan. Banyak perempuan yang dicalonkan hanya untuk memenuhi syarat administratif, bukan karena didukung secara nyata. Akibatnya, perempuan kesulitan bersaing karena tidak mendapat pelatihan, dana kampanye, atau jaringan politik yang memadai. Hal ini membuat mereka berada

dalam posisi yang lemah saat bertarung di pemilu. Karena itu, mahasiswa perlu tahu bahwa tantangan ini nyata dan kompleks, tidak sekadar soal siapa yang paling kompeten. Dengan pemahaman seperti itu, mereka akan lebih bisa menilai dan mendukung kebijakan kuota secara adil dan rasional.

Di sisi lain, kampus seharusnya menjadi tempat yang membentuk pola pikir kritis dan kesadaran terhadap isu-isu keadilan, termasuk kesetaraan gender. Melalui pembelajaran, diskusi, organisasi, dan kegiatan kemahasiswaan, mahasiswa bisa diberi ruang untuk memahami realitas sosial secara utuh. Tapi faktanya, masih banyak perguruan tinggi yang belum menempatkan isu gender sebagai bagian penting dalam kurikulum. Akibatnya, mahasiswa kurang terekspos pada isu-isu representasi perempuan dalam politik. Hal ini bisa menyebabkan pemahaman mereka kurang dalam atau bahkan keliru. Maka, riset ini penting untuk mengetahui apakah pendidikan politik yang mereka terima sudah cukup membekali mereka dalam memahami isu kuota perempuan, atau masih perlu perbaikan ke depannya.

Media juga punya pengaruh besar terhadap cara mahasiswa memandang perempuan dalam politik. Sayangnya, media seringkali menampilkan politisi perempuan dari sisi yang tidak relevan, seperti penampilan fisik atau urusan pribadi. Ini memperkuat pandangan bahwa perempuan tidak serius atau tidak cocok berada di ruang politik. Mahasiswa yang setiap hari terpapar media sosial bisa saja tanpa sadar menyerap pandangan seperti ini. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apakah persepsi mahasiswa terbentuk berdasarkan informasi yang kritis, atau justru dari pengaruh media yang bias. Meneliti ini akan

membantu kita memahami dari mana persepsi itu berasal dan bagaimana cara mengatasinya lewat pendidikan dan literasi media.

Selain itu, lingkungan sosial dan budaya lokal juga mempengaruhi pandangan mahasiswa. Universitas Siliwangi yang berada di Tasikmalaya, Jawa Barat, berada dalam masyarakat yang nilai-nilainya masih cukup konservatif. Dalam lingkungan seperti ini, peran perempuan dalam ruang publik, apalagi politik, masih sering diperdebatkan. Ada kalanya perempuan dianggap melanggar norma ketika terlalu aktif di luar rumah. Pandangan seperti ini bisa ikut terbawa dalam cara mahasiswa menilai kebijakan kuota. Oleh sebab itu, penelitian ini juga akan melihat bagaimana budaya lokal membentuk persepsi mahasiswa terhadap isu ini. Kita perlu memahami konteks sosial mereka agar bisa memberi solusi yang tepat dan relevan.

Selain itu, penting juga untuk melihat sejauh mana mahasiswa sadar bahwa keterwakilan perempuan di parlemen membawa dampak nyata bagi kebijakan publik. Perempuan yang duduk di kursi legislatif biasanya lebih sensitif terhadap isu-isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, serta kesejahteraan keluarga. Jika mahasiswa memahami bahwa kehadiran perempuan bukan hanya soal jumlah, tetapi soal dampaknya terhadap kebijakan, maka mereka akan lebih menghargai pentingnya kuota. Tapi jika tidak, maka mereka mungkin melihat kebijakan ini sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting atau bahkan tidak adil bagi laki-laki.

Pemahaman sejarah juga penting dalam membentuk cara pandang mahasiswa. Jika mereka tahu bahwa perjuangan perempuan dalam politik bukan

sesuatu yang instan, melainkan hasil dari perjuangan panjang sejak zaman Kartini hingga reformasi, mereka akan lebih menghargainya. Kebijakan kuota bukanlah hadiah dari negara, tapi hasil dari perjuangan keras gerakan perempuan. Tanpa pemahaman ini, kuota bisa saja dianggap sebagai kebijakan yang dipaksakan. Maka dari itu, dalam penelitian ini penting juga untuk melihat apakah mahasiswa mengetahui dan memahami sejarah perjuangan politik perempuan di Indonesia. Ini bisa jadi penentu apakah mereka mendukung kuota dengan alasan yang kuat atau hanya mengikuti arus.

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan penting bagi kampus dan para dosen untuk meningkatkan kualitas pendidikan politik di lingkungan mahasiswa. Misalnya, dengan memperbanyak diskusi soal gender, memperkuat organisasi mahasiswa berbasis kesetaraan, atau menyisipkan materi kesadaran gender dalam berbagai mata kuliah. Dengan begitu, kampus bisa membantu mahasiswa mengembangkan perspektif yang lebih inklusif terhadap keterwakilan perempuan. Pendidikan tidak hanya soal teori, tapi juga soal membentuk cara pandang yang adil dan kritis terhadap realitas sosial. Jika mahasiswa paham pentingnya keadilan gender, maka besar kemungkinan mereka akan membawa nilai itu ke dalam dunia kerja dan politik di masa depan.

Tak hanya bagi kampus, hasil penelitian ini juga bermanfaat untuk pemerintah dan partai politik. Jika kita tahu apa yang menjadi persepsi mahasiswa terhadap kebijakan kuota, maka pemerintah bisa menyusun strategi komunikasi yang lebih tepat sasaran. Misalnya, jika mahasiswa masih belum paham pentingnya kuota, maka perlu dibuat kampanye edukatif yang lebih menyentuh.

Jika hambatannya adalah budaya atau nilai-nilai konservatif, maka pendekatannya bisa lebih kultural dan dialogis. Dengan begitu, proses demokratisasi bisa berjalan lebih efektif dan inklusif. Dan yang terpenting, generasi muda tidak akan merasa asing dengan kebijakan-kebijakan yang bertujuan menciptakan kesetaraan.

Sebagai kesimpulan, penelitian tentang bagaimana mahasiswa FISIP Universitas Siliwangi memandang kebijakan kuota 30 persen perempuan di legislatif sangat penting untuk dilakukan. Ini bukan sekadar soal opini mahasiswa, tapi juga soal masa depan representasi perempuan dalam politik Indonesia. Melalui penelitian ini, kita bisa tahu sejauh mana generasi muda mendukung atau menolak kebijakan afirmatif, dan faktor apa saja yang mempengaruhi sikap mereka. Hasilnya bisa digunakan untuk merancang pendidikan dan kebijakan yang lebih tepat, dan pada akhirnya mendukung terciptanya parlemen yang lebih setara. Karena demokrasi yang adil tidak hanya ditentukan oleh suara terbanyak, tapi juga oleh sejauh mana semua kelompok punya kesempatan yang sama untuk didengar dan diwakili.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana persepsi mahasiswa FISIP Universitas Siliwangi terhadap kebijakan kuota 30% perempuan dalam lembaga legislatif di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persepsi mahasiswa FISIP Universitas Siliwangi terhadap kebijakan kuota 30 persen

perempuan dalam lembaga legislatif. Penelitian ini juga ditujukan untuk menggambarkan sejauh mana mahasiswa memahami pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik dan bagaimana pandangan mereka terhadap kebijakan afirmatif tersebut. Selain itu, penelitian ini berupaya mengungkap adanya perbedaan pandangan antar kelompok mahasiswa berdasarkan latar belakang tertentu seperti jenis kelamin, pengalaman berorganisasi, atau wawasan politik. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai sikap mahasiswa terhadap upaya peningkatan peran perempuan dalam politik melalui kebijakan kuota.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang dapat dikategorikan ke dalam manfaat teoritis dan praktis.

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah dalam bidang ilmu politik, khususnya mengenai studi perilaku pemilih, kebijakan afirmasi gender, dan representasi politik perempuan. Dengan memfokuskan kajian pada persepsi mahasiswa terhadap kebijakan kuota 30 persen perempuan di lembaga legislatif, penelitian ini dapat memberikan perspektif baru dalam melihat bagaimana generasi muda memahami dan merespons kebijakan yang bersifat afirmatif di ranah politik. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya

yang tertarik mengkaji isu-isu serupa dengan pendekatan yang lebih mendalam maupun komparatif.

## 2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi para pengambil kebijakan, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai politik, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh institusi pendidikan tinggi, khususnya FISIP Universitas Siliwangi, untuk meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran gender di kalangan mahasiswa melalui kurikulum, kegiatan organisasi kemahasiswaan, maupun diskusi akademik. Bagi masyarakat umum, terutama pemilih muda, penelitian ini diharapkan dapat mendorong refleksi kritis terhadap pentingnya partisipasi perempuan dalam proses demokrasi dan peran aktif mereka dalam pengambilan keputusan publik.